

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan pembangunan wilayah perkotaan di Indonesia, diikuti oleh peningkatan perpindahan sebagian rakyat pedesaan ke kota dengan anggapan akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hal ini tentunya sangat berdampak pada peningkatan jumlah penduduk kota yang juga sebanding dengan limbah yang akan dihasilkan. Perkembangan suatu daerah selalu dibarengi dengan kecenderungan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta diikuti kegiatan ibukota yang makin berkembang maka akan menimbulkan dampak adanya kecenderungan buangan/limbah yang meningkat dan bervariasi, Syafrudin, 2006: 2 (*dalam Fathiras, 2011*).

Daerah perkotaan akan ditandai dengan emisi unsur pencemar yang lebih kompleks, bila dibandingkan dengan pedesaan, kegiatan umum yang layak diperhitungkan sebagai sumber ialah antara lain : transportasi, permukiman, industri, dan pengelolaan limbah padat (sampah), (Soedomo, 2004).

Kodoatie, 2005: 27 (*dalam Isa 2011*) Mengemukakan bahwa jumlah dan laju penduduk perkotaan yang cenderung meningkat mengakibatkan sistem infrastruktur yang ada menjadi tidak memadai, karena perkembangannya kalah cepat dengan perkembangan penduduk. Hasilnya adalah kota menjadi tempat yang tidak nyaman. Permasalahan lingkungan yang umumnya terjadi di perkotaan adalah pengelolaan sampah perkotaan yang kurang baik.

Permasalahan sampah diperkotaan adalah salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan besar bagi pengelola kota untuk ditangani. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun telah mengakibatkan meningkatnya aktivitas yang tentu saja juga berimplikasi terhadap peningkatan produksi sampah di perkotaan. Pengelolaan sampah dikota-kota di Indonesia sampai saat ini belum dapat diperoleh hasil yang optimal. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi, Nuryani, 2003 (*dalam* Isa, 2011).

Di Indonesia, diperkirakan hanya sekitar 60%-70 % sampah yang dapat diangkut oleh pengelola ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan 30% sisanya ditangani sendiri oleh masyarakat atau malah terbuang di berbagai tempat lainnya. Akibatnya sampah yang merupakan bagian sisa aktifitas manusia apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai permasalahan dan akibat-akibat negatif terhadap kehidupan manusia maupun sekitarnya berupa gangguan lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit, Hadiwiyoto,116:1983 (*dalam* Yoga, 2003).

Pengelolaan sampah juga menghadapi masalah dalam hal institusi. Masalah pokok dalam aspek institusi antara lain adalah institusi pengelola masih banyak yang berbentuk Dinas Kebersihan yang memiliki kelemahan dalam pengelolaan anggaran operasi dan pemeliharaan. Dinas kebersihan juga seringkali kurang dapat mengembangkan sumber daya manusianya untuk lebih professional/petugas yang menangani masalah persampahan.

Sistem pengelolaan sampah di perkotaan dengan status kota sedang dan kota kecil dikatakan optimal (Menurut SNI 19-3242-1994) apabila fasilitas pengelolaan sampah seperti Gerobak sampah/ sejenisnya, untuk vol. 1 m³ dengan kapasitas pelayanannya 140 kk, 800 jiwa. Container arm roll truk untuk volume 6 m³ dengan kapasitas pelayanan 825 kk, 4.950 jiwa, untuk vol. 8 m³ dengan kapasitas pelayanan 1.100 kk, 6.600 jiwa, untuk vol. 10 m³ dengan kapasitas pelayanan 1.375 kk, 8.250 jiwa. Transfer Depo Tipe volume Tipe I dengan kapasitas pelayanan > 200 m³, Tipe I I 60 – 200 m³, Tipe I I I 10 – 20 m³. Kebutuhan minimal peralatan berdasarkan klasifikasi rumah Alat pengumpul seperti gerobak sampah/sejenisnya untuk 80 rumah 1 buah, untuk 81-500 rumah 4 buah, 501-2000 rumah 16 buah, >2000 rumah adalah >16 buah. Transfer depo Tipe I, Tipe II, Tipe III dengan klasifikasi rumah 80 - >2000 hanya memerlukan 1 unit. Perencanaan operasional pengumpulan sampah seharusnya memperhatikan :

- Ritasi 1 – 4 rit/hari,
- Periodisasi 1 hari, 2 hari atau maksimum 3 hari sekali, tergantung kondisi komposisi sampah, kapasitas kerja, desain peralatan dan kualitas pelayanan,
- Mempunyai petugas yang tetap dan dipindahkan secara periodik,
- Pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah sampah terangkut, jarak tempuh dan kondisi daerah.

Disisi lain, besarnya kewenangan dan tanggung jawab pengelola dituntut untuk terus bekerja dan memberikan hasil yang lebih baik. Untuk itu, keberadaan personil perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja pengelola. Namun pada kenyataannya, tidak ada personil berlatar belakang pendidikan yang berhubungan dengan bidang kerja, LAKIP, 2008 (*dalam* Maswari, 2010).

Sejak krisis ekonomi yang berkepanjangan menimpa Indonesia mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja sarana dan prasarana persampahan terutama kualitas TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Buruknya kinerja pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan yang serius yang perlu segera ditangani. Sesuai dengan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Permen PU No.21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) tanggal 15 September 2006 bahwa kota metropolitan/besar harus mengoperasikan TPA dengan *Sanitary Landfill* yaitu menimbun sampah kemudian diratakan, dipadatkan kemudian diberi lapisan tanah di atasnya sebagai lapisan penutup serta mempunyai alat penanggulangan air lindi dan kota sedang/kecil harus mengoperasikan TPA dengan *Controlled Landfill* yaitu mengelola sampah dengan melakukan penimbunan sampah dengan tanah atau di sebut dengan pengurungan setiap 7(tujuh) hari sekali sampai rata dengan permukaan sebelum ditimbun dengan sampah baru (BLH: 2011).

Kabupaten Buol adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah Kabupaten Buol mencapai 4.043,57 km². Wilayah administrasi Kabupaten Buol terdiri dari 11 Kecamatan, 100 desa dan 7 kelurahan. Jumlah penduduk di Kabupaten Buol Tahun 2009 mencapai 118.892 jiwa (meningkat 1.864 jiwa atau 1,59% dari tahun 2008). Jumlah penduduk Kecamatan Biau tahun 2010 mencapai 27.567 jiwa meningkat 6.619 jiwa dari tahun 2009 yang mencapai 20.948 jiwa (Kecamatan Biau Kabupaten Buol, 2010).

Observasi awal menunjukkan bahwa Kecamatan Biau masih memiliki banyak masalah lingkungan sehubungan dengan pengelolaan sampah yang kurang optimal yang mengakibatkan masih banyak jumlah sampah yang tidak terangkut. Daerah yang harus dilayani pengelola sampah adalah Kelurahan Buol, Kelurahan Kali, kelurahan Leok II dan Kelurahan Leok I dengan total jumlah penduduk 16.944 jiwa, 3.126 kk. Jumlah sampah tahun 2009 di Kecamatan Biau yang dilayani pengelola sampah mencapai 30 m³/hari. Jumlah sampah yang terangkut saat ini berkisar antara 18m³/hari sampai dengan 24m³/hari. Besarnya sampah yang didaur ulang adalah 2 m³/hari sedangkan sampah yang tidak terangkut mencapai 4,8 m³/hari. Kecamatan Biau saat ini sudah melakukan pengelolaan persampahan di wilayahnya. Pengelolaan persampahan dilakukan dengan cara *open dumping*. Sampah diambil dari rumah penduduk, pertokoan, perkantoran dan sarana-sarana yang lainnya kemudian di buang ke TPA, Kecamatan Biau hanya memiliki (Satu) TPA yang terletak di desa Los. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang ada masih kurang memenuhi karena jumlah TPS yang tersedia hanya 506 buah (TPS terbuka 6 buah dan 500 TPS tertutup) yang terbagi disetiap rumah penduduk, perkantoran, pertokoan serta pasar sedangkan jumlah tempat tinggal yang membutuhkan TPS berjumlah 3.997 rumah, alat angkut untuk pengelolaan sampah juga hanya berjumlah 12 buah (gerobak sampah 4 dengan vol. 1 m³, Dump truck 3 dengan vol. 6 m³, Arm roll besar 1 dengan vol. 6 m³ dan motor sampah 4 dengan dvol. 1 m³) dan tenaga pengelola persampahan yang ada juga masih belum memadai jumlah personil (56 orang) dan kualifikasi (belum memperoleh pelatihan) sedangkan luas daerah yang seharusnya mendapatkan

pelayanan adalah 157,1 km². Dari segi biaya operasional yang juga masih belum mencukupi (untuk kebutuhan solar yang masih belum mencukupi) (BLH Kab. Buol : 2011).

Dari latar belakang inilah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengenai “Sistem Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Biau Kabupaten Buol Sulawesi Tengah Tahun 2012”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana Sistem Pengelolaan Sampah di Kecamatan Biau Kabupaten Buol Sulawesi Tengah Tahun 2012.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Biau Kabupaten Buol Sulawesi Tengah Tahun 2012.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Untuk mengetahui pengelolaan sampah pada saat pemindahan sampah di Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

1.3.2.2 Untuk mengetahui pengelolaan sampah pada saat pengangkutan sampah di Kecamatan Biau Kabupaten Buol

1.3.2.3 Untuk mengetahui pengelolaan sampah pada saat pembuangan akhir/pemrosesan akhir sampah di TPA Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

1.3.2.4 Untuk mengetahui perlengkapan pelindung diri yang digunakan oleh petugas pengelola sampah di Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi dunia ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat memperkaya konsep Sistem pengelolaan akhir sampah untuk waktu yang akan datang, sehingga untuk penelitian-penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lebih jauh lagi,

1.4.2 Bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buol diharapkan dapat dipakai sebagai salah satu bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dalam membuat kebijakan di bidang persampahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.

1.4.3 Bagi peneliti sendiri dapat digunakan sebagai pembelajaran dan juga sebagai lanjutan penelitian dan sebagai bahan kajian ilmiah dalam menyampaikan usulan pengelolaan sampah di Kecamatan Biau Kabupaten Buol.